

Implementasi Kampus Merdeka: Implikasi pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Aceh Barat

Nilia Safrida

Universitas Teuku Umar, Aceh-Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: August 23, 2021
 Revised: September 27, 2021
 Accepted: October 25, 2021
 Available online: December 07, 2021

KEYWORDS

Kampus merdeka, implementasi merdeka belajar, dampak kebijakan

CORRESPONDENCE

Phone: +62 822 4708 7437
 E-mail: safriidania@gmail.com

A B S T R A C T

Learning outside of the study program is one of the programs offered by the Independent Campus Policy, which is a new policy in the field of education. The study will concentrate on student exchange programs, internships, and village development, all of which should be evaluated for their feasibility. This study employs a qualitative technique using a case study approach, and the research indicator is David C. Korten's theory of compliance. The findings suggest that not all PTNs in West Aceh have adopted the Merdeka Campus. Although the Merdeka Campus policy has been designed to meet the demands of students, students have complained about rising living costs and the lack of precise criteria for each activity. The implementing organization in charge of the program is ineffective because there are still activities without a competent agency. The target group, students, believe that the program's implementing organization is inconsistent in formulating and issuing policies, which has a detrimental influence on students. It can be concluded that PTN has attempted to implement the independent campus policy in West Aceh, and that this is viewed positively by students; however, improvements are required so that the results of the implementation of an independent campus can provide the best results for improving the quality of higher education in West Aceh.

Pendahuluan

Tujuan utama dari penelitian ini ialah menguraikan implementasi kebijakan Merdeka Belajar berupa program Kampus Merdeka pada lingkup Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kabupaten Aceh Barat. Kampus Merdeka merupakan salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar yang di canangkan Mendikbud yaitu Nadiem Makarim untuk memperbaiki paradigma pendidikan Indonesia. Kampus Merdeka menjadi suatu program pendidikan yang memberikan kebebasan bagi perguruan tinggi secara otonom, dengan merdeka menentukan kurikulum, hingga merdeka dari birokrasi berbelit dalam hal [administrasi \(Ditjen Pendidikan Tinggi, 2020\)](#). Berbicara tentang pendidikan tentunya tidak luput dari proses pembelajaran, penelitian hingga kurikulum pembelajaran, yang notebenanya menjadi acuan untuk menciptakan penerima didikan menjadi sejahtera dan lebih maju. Pendidikan menjadi aspek penting dalam kehidupan, sebab pendidikan merupakan mesin utama penggerak kebudayaan. Pendidikan pada dasarnya melingkupi proses pembelajaran yang menjadi kunci perkembangan suatu peradaban. Bagi negara Indonesia, pendidikan merupakan suatu yang sangat bernilai, karena dalam pembukaan UUD 1945 alenia 4 tertuang jika tujuan berdirinya negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga negara bertanggungjawab dan berkewajiban menciptakan masyarakat yang cerdas melalui pendidikan berkualitas.

Usaha pemerintah dalam merealisasikan perwujudan pendidikan berkualitas telah dilakukan melalui berbagai kebijakan yang di implementasikan. Menurut Mulyadi (2015), implemantasi merupakan tindakan yang mengacu pada upaya mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan ([Mulyadi, 2015](#)). Contoh kebijakan di bidang pendidikan yang telah dilaksanakan pemerintah bahkan sebelum pemberlakuan kurikulum Kampus Merdeka adalah alokasi dana APBN untuk pendidikan hingga perealisasi program beasiswa. Meski kebijakan tersebut berhasil diterapkan, nyatanya pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara lain (Indonesia berada di peringkat 73 pendidikan didunia), dibawah Malaysia (57) dan Brunai Darussalam (60) dengan negara China sebagai pemegang peringkat puncak ([BBC.com, 2019](#)). Realita ini tentu menimbulkan anomali jika sistem pendidikan Indonesia tidak lagi relevan dengan

tuntutan dan persaingan global era revolusi 4.0, sebab dari hari kehari jumlah pengangguran Indonesia bergelut sajana juga terus meningkat. Maka dari itu, calon tenaga kerja terkhusus mahasiswa diharuskan mempunyai skill baru di dunia kerja berkaitan dengan data, teknologi dan kepemilikan akan karakter unggul (Suryaman, 2020).

Keberadaan program Kampus Merdeka menjadi aksi nyata pemerintah membenahi sistem pendidikan Indonesia agar sesuai dengan tuntutan zaman. Penerapan kebijakan ini pada perguruan tinggi diharapkan bisa menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi, dalam artian mempunyai soft skills dan hard skills baik untuk menjadi angkatan kerja yang dibutuhkan, atau menciptakan pemimpin berkepribadian dan unggul (Marjan, Tuti & Aswita, 2021). Program Kampus Merdeka yang dicanangkan Mendikbud disambut baik oleh berbagai pihak karena dianggap mampu melahirkan sarjana dengan kuantitas dan kualitas yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja. Hal ini dikarenakan melalui Kampus Merdeka mahasiswa diberikan kesempatan memilih mata kuliah apapun berdasarkan keinginannya untuk meningkatkan kompetensi, dengan kata lain semua mata kuliah menjadi pilihan bukan lagi kewajiban (Sopiansyah & Masruroh, 2021).

Beberapa hasil penelitian terdahulu berpandangan jika keberadaan zaman pada revolusi industri 4.0 menjadi pemicu utama penerapan Kampus Merdeka di institusi pendidikan, agar pendidikan di perguruan tinggi dapat sejalan dengan kebutuhan zaman, dan lulusan mampu terjun ke dunia kerja yang dinamis (Siregar et al., 2020); (Sopiansyah & Masruroh, 2021); (Rodiyah, 2021). Dalam tulisan Siti Mustaghfiroh menyebutkan apabila konsep "Merdeka Belajar" memiliki kesamaan dengan konsep pendidikan progresivisme oleh John Dewey yaitu konsep filsafat pendidikan yang mengehendaki perubahan diri penerima didikan menjadi pribadi tangguh, mampu menghadapi persoalan dan mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat, akibat menekankan kemerdekaan dan keleluasaan bagi instansi pendidikan untuk menggali secara maksimal kecerdasan, kemampuan, dan potensi peserta didik dengan natural, fleksibel, luwes, demokratis, dan menyenangkan (Mustaghfiroh, 2020).

Kampus Merdeka sebagai program Merdeka Belajar memiliki empat kebijakan utama, yaitu: Memudahkan pembukaan program studi baru bagi perguruan tinggi, merubah sistem akreditasi, memudahkan perguruan tinggi menjadi badan hukum, serta memberikan hak kebebasan bagi Mahasiswa mengambil SKS di dalam maupun luar prodi dan luar Universitas seperti antar perguruan tinggi lain, instansi pemerintah hingga perusahaan (Hasim, 2020). Penelitian ini akan terfokus pada kebijakan program pemberian hak kebebasan bagi mahasiswa mengambil SKS diluar prodi dan universitas atau instansi lain, sebab menjadi poin yang paling dirasakan dampaknya oleh pihak universitas. Landasan dari program tersebut adalah Permendikbud RI No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang melingkupi 8 kegiatan pembelajaran yaitu magang, pertukaran mahasiswa, penelitian/riset, menjadi asisten mengajar di satuan pendidikan, kegiatan wirausaha, membangun desa (KKNT), proyek kemanusiaan dan studi/proyek independen (Kemendikbud RI, 2020). Pandangan positif akan penerapan Kampus Merdeka juga dicetuskan oleh Lukman Hadi, dimana ia menyatakan Merdeka Belajar menjadi program Kemendikbud RI yang mampu membenahi kurikulum dan kegiatan belajar instansi pendidikan di Indonesia, terbukti dari besarnya rasa setuju masyarakat termasuk mahasiswa akan konsep Merdeka Belajar untuk pendidikan Indonesia (Hadi, 2020). Bahkan berdasarkan riset Wilestari yang melibatkan 765 reponden, 25% diantaranya setuju agar kurikulum perguruan tinggi dapat dimodifikasi dengan konsep Kampus Merdeka (Wilestari, 2021).

Seiring berjalannya waktu implementasi kebijakan Kampus Merdeka justru menimbulkan berbagai problematika baru yang mempertanyakan seberapa finalnya kesiapan pemerintah dan perguruan tinggi untuk mempraktikkan kebijakan Kampus Merdeka. Hal ini tercermin dari program Kampus Merdeka yang dipandang terlalu gamblang, mengubah tatanan pendidikan Indonesia secara absolut, mempermudah sektor ekonomi menjajahi bidang pendidikan serta lebih pro pada PTN besar atau kontra bagi perguruan tinggi kecil (Prabowo, 2020). Selain itu, penerapan konsep Kampus Merdeka juga menghadapi kendala dalam proses implementasi akibat belum semua perguruan tinggi menerapkannya, diikuti minimnya sosialisasi terkait program (Siregar et al., 2020). Kemudian, tak dapat dipungkiri banyak perguruan tinggi masih terkendala dalam mengadaptasi kurikulum Kampus Merdeka dengan kurikulum sebelumnya, sulitnya merealisasikan program kerjasama dengan instansi pemerintahan maupun perusahaan akibat bentuk kerjasamanya masih terbatas (Marjan, Tuti & Aswita, 2021).

Selama ini sebagian besar penelitian tentang Kampus Merdeka belum benar-benar fokus untuk menilai implementasi kebijakan tersebut secara nyata, sebab penelitian sebelumnya hanya merujuk pada studi literatur atau kepustakaan, sehingga tidak menggambarkan realita penerapan konsep Kampus Merdeka yang sebenarnya. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan melihat implementasi program Kampus Merdeka dalam pelaksanaan program pembelajaran di luar program studi, akan tetapi disini peneliti hanya akan meneliti tiga program saja yang telah dilaksanakan di lokasi penelitian berdasarkan observasi awal mencakup pertukaran mahasiswa, magang, dan membangun desa. Alat analisis yang peneliti gunakan adalah teori [David C. Korten \(1984\)](#) yang memiliki sebutan teori implementasi kebijakan model kesesuaian, dengan indikator keberhasilan kebijakan bergantung pada tiga elemen utama, diantaranya: kesesuaian program dengan kebutuhan penerima manfaat (target group), kesesuaian program dengan organisasi pelaksana (organisasi) dan kesesuaian kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana atau kesesuaian antara syarat yang diberikan organisasi dengan kemampuan pemenuhan syarat oleh target grup ([Korten, 1984](#)). Pemilihan teori tersebut dikarenakan dapat menguraikan implementasi secara sistematis, serta mampu menjabarkan kesesuaian dan ketidaksesuaian implementasi kebijakan, sehingga bisa menuntun pada solusi dari permasalahan akibat ketidaksesuaian implementasi yang dihadapi.

Peneliti melaksanakan penelitian di Kabupaten Aceh Barat, sebab menjadi daerah di pantai barat selatan Aceh yang memiliki dua Perguruan Tinggi Negeri, seperti: Universitas Teuku Umar, dan STAIN Teungku Dirundeng, meskipun kedua PTN ini belum beakreditasi sangat baik (A) ([Kemendikbud RI, 2020](#)). Berdasarkan observasi awal, penulis menemukan jika penerapan Kampus Merdeka justru mendatangkan beragam tanda tanya baru, rasa bingung berkepanjangan, hingga muncul kebimbangan akibat kebebasan memilih fokus pendidikan. Timbulnya berbagai keluhan tersebut tentu dilatar belakangi perealisasi kebijakan Kampus Merdeka belum diiringi dengan aturan baku nan kompleks, capaian terukur kebijakan yang jelas, pedoman penerapan yang sesuai dan kesiapan seluruh perguruan tinggi negeri dalam mengamalkan kebijakan baru ini, baik melalui kelayakan fasilitas atau kualitas pendidikan antar perguruan tinggi, sehingga kebijakan Kampus Merdeka malah menciptakan kesemrautan dalam masa awal perealisasiannya.

Oleh karena itu, penelitian ini dirasa perlu dilakukan untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan Kampus Merdeka di lokasi penelitian, berhasil memperbaiki kualitas pendidikan dan menciptakan lulusan kompeten untuk diserap di dunia kerja atau tidak, dan mengetahui problematika serta solusi yang dapat muncul dari proses implementasi konsep tersebut. Maka dari itu, berdasarkan uraian sebelumnya penulis tertarik untuk meneliti tentang "Implementasi Kampus Merdeka: Implikasi pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Aceh Barat".

Metode

Metode harus ditulis singkat, padat, jelas, tetapi mencukupi sehingga dapat di replikasi. Metode penelitian mengemukakan jenis penelitian, alasan sebuah metode digunakan, populasi sampel/subjek, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Penelitian kuantitatif perlu mencantumkan teknik pengujian hipotesis yang relevan. Seluruh ketentuan spesifik yang ditetapkan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis data dijelaskan pada bagian metode ini.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Barat, tepatnya pada dua PTN, yaitu: Universitas Teuku Umar, dan STAIN Teungku Dirundeng. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus sebab akan menyelidiki masalah terkait kondisi sosial ([Iskandar, 2014](#)). Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini memerlukan analisis cermat mengenai suatu program, peristiwa, maupun kelompok individu ([Creswell, 2010](#)) Data primer penelitian berasal dari hasil wawancara dan observasi melibatkan berbagai pihak di perguruan tinggi negeri Aceh Barat, sedangkan data sekunder bersumber dari studi literatur e-jurnal, e-book, hingga dokumen pemerintahan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif sesuai pandangan Miles dan Huberman dalam [Moleong \(2017\)](#), berupa: Koleksi data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Penentuan narasumber atau informan penelitian sebagai sumber data primer ditetapkan melalui teknik purposive sampling (menurut kriteria tertentu) dan accidental random sampling (secara kebetulan) meliputi Mahasiswa/i di Universitas Teuku Umar, dan STAIN Teungku Dirundeng Kabupaten Aceh Barat, yaitu berikut pada tabel 1:

Tabel 1. Identitas Informan

Nama	Instansi	Keterangan
Putri Maulina, S.Ikom., M.Ikom	Universitas Teuku Umar	Kaprodi Ilmu Komunikasi
Sri Dwi Friwanti, MH	STAIN Teungku Dirundeng	Kaprodi Hukum Tata Negara Dan P. Kaprodi Pgsi
Leli Ramana Sari	Universitas Teuku Umar	Mahasiswa Magang
Lilis Sartika	Universitas Teuku Umar	Pertukaran Mahasiswa Regional
Iskandar Muda	Universitas Teuku Umar	Pertukaran Mahasiswa Internasional
Susi Maulina Dewi	Universitas Teuku Umar	Mahasiswa Membangun Desa
Rezoi Yana	STAIN Teungku Dirundeng	Mahasiswa Hukum Perbankan Syariah
Dian Ayu Permata	STAIN Teungku Dirundeng	Mahasiswa Hukum Perbankan Syariah
Cut Nanda Rahma	STAIN Teungku Dirundeng	Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Ibtida'iyah (PGSI)

Teknik analisis data yang peneliti digunakan adalah model analisis interaktif pandangan Miles dan Huberman dalam (Moleong, 2017), berupa: koleksi data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Penentuan narasumber atau informan penelitian sebagai sumber data primer ditetapkan melalui teknik purposive sampling (menurut kriteria tertentu) dan accidental random sampling (secara kebetulan) meliputi Ketua Program Studi dan Mahasiswa/i di Universitas Teuku Umar dan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan memuat tabulasi data hasil penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan metode dan peubah yang digunakan. Analisis dan evaluasi terhadap data tersebut sesuai dengan formula hasil kajian teoritis yang telah dilakukan. Pembahasan hasil analisis dan evaluasi dapat menerapkan metode komparasi, penggunaan persamaan, grafik, gambar, dan tabel. Setiap tabel dan grafik harus diberi nomor dan nama dan ditempatkan sedekat mungkin dengan paragraf di mana tabel dan grafik tersebut dibahas. Interpretasi hasil analisis untuk memperoleh jawaban, nilai tambah, dan ke-manfaatan yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

Kebijakan Kampus Merdeka

Kampus Merdeka merupakan program dari Merdeka Belajar yang telah direalisasikan melalui landasan hukum yang kuat seperti UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hingga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi. Pemberlakuan kebijakan program Kampus Merdeka merupakan harapan sekaligus jawaban dari permasalahan pendidikan yang dialami perguruan tinggi di Indonesia. Kebijakan ini lebih mengacu pada penguatan kompetensi mahasiswa untuk dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Perguruan tinggi sebagai wadah utama yang menaungi aktivitas mahasiswa kemudian diberikan tanggungjawab menciptakan pembelajaran inovatif demi melatih keterampilan, dan meningkatkan pengetahuan mahasiswa secara fleksibel namun otonom. Program Kampus Merdeka memiliki empat kebijakan utama, yaitu memudahkan pembukaan program studi baru bagi perguruan tinggi, merubah sistem akreditasi, memudahkan perguruan tinggi menjadi badan hukum, serta memberikan hak kebebasan bagi mahasiswa mengambil SKS di dalam maupun luar prodi dan luar Universitas seperti antar perguruan tinggi lain, instansi pemerintah hingga perusahaan (Hasim, 2020).

Program Kampus Merdeka dalam penelitian ini akan di runutkan pada kebijakan memberikan hak kebebasan bagi mahasiswa mengambil SKS diluar prodi dan luar Universitas. Kebijakan pembelajaran belajar di luar program studi terdiri dari delapan kegiatan (Ditjen Pendidikan Tinggi, 2020) diantaranya:

1. Pertukaran mahasiswa (1 semester)
2. Magang/praktik kerja di perusahaan, industri hingga instansi pemerintah(1 semester)
3. Membangun desa/ KKNT (Tematik) (1 semester)

4. Kegiatan proyek wirausaha
5. Proyek kemanusiaan
6. Studi independen
7. Penelitian atau riset
8. Asisten mengajar pada satuan pendidikan

Melalui pelaksanaan program kegiatan tersebut, mahasiswa didorong untuk menyusun karya tulis ilmiah berupa artikel ilmiah sebagai tugas akhir/skripsi dengan memberikan kontribusi lebih bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan. Berikut disajikan pada gambar 1,2,3 dan 4 tentang Program kebijakan yang menjadi fokus penelitian adalah pertukaran mahasiswa, magang dan membangun desa, sebab menjadi program yang telah dilaksanakan oleh PTN di Aceh Barat. Demi menganalisis implementasi kebijakan, peneliti menggunakan Teori David C. Korten tentang teori kesesuaian untuk menguraikan implementasi ketiga program utama tersebut.



Gambar 1. Pertukaran mahasiswa Mahasiswa Universitas Teuku Umar Meulaboh dengan Universitas Malikussaleh Lhokseumawe



Gambar 2. Pelaksanaan magang Kampus Merdeka Mahasiswa Universitas Teuku Umar di BKPSDM Kabupaten Nagan Raya



Gambar 3. Pertukaran mahasiswa UTU dengan University Malaysia Terengganu



Gambar 4. Pelaksanaan kegiatan membangun desa Kampus Merdeka di Gampong Lancong, Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat

Kesesuaian Program dengan Pemanfaat

Keberhasilan suatu implementasi tidak terlepas dari kesesuaian kebijakan yang diterapkan dengan apa yang dibutuhkan atau di inginkan kelompok sasaran. Oleh sebab itu, keselarasan antara kebijakan dan kebutuhan menjadi hal mutlak yang harus di capai. Berdasarkan hasil penelitian, PTN STAIN Teungku Dirundeng ternyata belum menerapkan Kampus Merdeka. Berdasarkan temuan penelitian, PTN STAIN Teungku Dirundeng belum menerapkan Kampus Merdeka dikarenakan kebijakan yang masih terlalu baru sedangkan pihak STAIN pada 2019 telah menerapkan kurikulum KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yang bahkan belum rampung dilaksanakan. Sehingga untuk pelaksanaan Kampus Merdeka di STAIN dalam waktu dekat belum bisa dipastikan (satu atau dua tahun kedepan). Namun, pihak STAIN melalui kaprodi Hukum Tata Negara menyebutkan jika wacana untuk penerapan Kampus Merdeka telah ada. Uraian tersebut menunjukkan jika Universitas keagamaan juga bisa menerapkan Kampus Merdeka dengan alasan berada dibawah Kemenag sekaligus tunduk pula di bawah Kemendikbud. Hal ini terbukti dari belum adanya program-program kampus merdeka yang dijalankan mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng, salah satu contohnya mahasiswa STAIN belum melaksanakan magang 20 SKS selama enam bulan, mereka hanya menjalankan magang 4 SKS selama 2 bulan, dan tidak bisa memilih mengambil skripsi maupun bukan, karena skripsi menjadi hal wajib bagi mereka.



Gambar 5. Kegiatan pembelajaran mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Meski PTN STAIN Teungku Dirundeng belum menerapkan Kampus Merdeka, pihak Universitas Teuku Umar (UTU) nyatanya telah merealisasikan kebijakan ini sejak awal pemberlakuannya yaitu tahun 2020. Tujuan utama penerapan Kampus Merdeka yang dipahami oleh mahasiswa UTU program pertukaran mahasiswa ialah untuk bisa mendapatkan pengalaman baru dan ilmu baru yang nantinya bisa di transmisikan ke universitas asal. Mahasiswa magang menyebutkan jika tujuan pelaksanaan magang ialah untuk mendapat pengalaman kerja, mempraktekkan teori perkuliahan, memberi peluang peluang, membangun relasi serta melatih dan mengembangkan skill. Program magang menurut mahasiswa dapat menjadi solusi berbagai permasalahan yang dihadapi mahasiswa dan perguruan tinggi, terutama meminimalisir jumlah pengangguran bergelar sarjana yang menjadi masalah utama saat ini.

Hal yang hampir serupa juga disampaikan oleh mahasiswa yang melaksanakan program membangun desa. Melalui program tersebut, mahasiswa bisa menyalurkan ilmu yang dimiliki secara langsung, bukan lagi di laboratorium. Kontribusi mahasiswa dalam program membangun desa terlihat lebih nyata memberikan dampak positif bagi masyarakat. Maka melalui program Kampus Merdeka tersebut, para mahasiswa sebagai kelompok sasaran merasa jika Kampus Merdeka sangat sesuai dengan kebutuhan dan mereka sangat mengapresiasi penerapan Kampus Merdeka. Namun, dalam pelaksanaannya mahasiswa masih menghadapi beberapa kendala, diantaranya ialah bagi mahasiswa magang merasa masih kurangnya ilmu yang dimiliki untuk dapat berkecimpung langsung dengan instansi magang. Bagi mahasiswa membangun desa, minimnya fasilitas yang menunjang pelaksanaan program di desa, sehingga dengan tenggat waktu yang hanya satu semester mahasiswa belum bisa memberikan kontribusi maksimal. Terkait pertukaran mahasiswa, informan menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru, aturan baru serta menyesuaikan sistem pembelajaran antara universitas yang dituju dengan universitas asal.

Pertukaran mahasiswa yang dilaksanakan oleh Universitas Teuku Umar bekerjasama dengan PTN regional yaitu Universitas Malikussaleh Aceh Utara melibatkan dua mahasiswa dan PTN internasional Universitas Malaysia Terengganu yang melibatkan 10 mahasiswa sehingga kekentalan kebhinekaan yang diharapkan dari program pertukaran belajar bisa terwakilkan. Pertukaran mahasiswa menurut informan menjadi hal yang diperlukan, utamanya untuk memperlihatkan perbedaan sistem pendidikan antar PTN yang ada untuk dapat saling menyesuaikan sisi positif dan berbenah demi mewujudkan peningkatan kualitas sistem pendidikan di masing-masing PTN. Kendala yang dihadapi mahasiswa adalah budaya dan sistem pembelajaran yang berbeda. Perbedaan yang paling kentara di rasakan oleh mahasiswa pertukaran pelajar internasional ialah budaya atau kebiasaan mahasiswa, bahasa, dan cara belajar, sehingga butuh adaptasi ekstra, sebab sosialisasi pelaksanaan pertukaran mahasiswa sebelum pelaksanaan sangat minim sehingga mahasiswa belum melaksanakan persiapan matang.

Selain terkendala dalam hal fasilitas, mahasiswa juga menghadapi kendala dalam hal ekonomi, dimana melalui pelaksanaan pertukaran mahasiswa dan membangun desa, pengeluaran mahasiswa menjadi meningkat. Hanya program pertukaran mahasiswa yang mendapatkan bantuan dari universitas berupa uang sewa tempat tinggal. Mahasiswa program magang dan membangun desa akhirnya mengeluhkan peningkatan pengeluaran akibat melaksanakan program Kampus Merdeka. Penggunaan anggaran bagi sewa tempat tinggal dan biaya hidup menjadi sumber pengeluaran utama. Pengeluaran biaya oleh mahasiswa tentu belum termasuk biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester rata-rata RP.1.000.000, sehingga jika

diakumulasikan bisa memberatkan mahasiswa. Mahasiswa pertukaran mahasiswa regional juga merasa terjadi peningkatan biaya hidup yang cukup signifikan pengeluaran biaya hidup mencapai Rp.1.000.000 dalam sebulan, padahal sebelum melaksanakan program pengeluaran kurang dari Rp.500.000 per bulan. Maka dari itu, mahasiswa berharap kampus dapat memberikan biaya hidup bagi mahasiswa sebesar Rp.300.000-Rp.200.000 per bulan, sehingga sedikit meringankan mahasiswa. Namun bagi mahasiswa pertukaran mahasiswa internasional, kuota yang minim menjadi kendala, berbeda dengan pertukaran mahasiswa regional, program ini dilaksanakan secara daring dan mahasiswa mendapat insentif dari pihak universitas sebesar Rp. 8.500.000 selama satu semester.

Serupa dengan ungkapan mahasiswa pertukaran pelajar regional, mahasiswa membangun desa menyatakan biaya yang dikeluarkan saat mengikuti program kampus merdeka ialah biaya sewa tempat tinggal dan biaya transportasi. Pembiayaan tersebut belum termasuk biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester, sehingga jika di akumulasikan bisa memberatkan mahasiswa nantinya. Hal tersebut tentu berbeda dengan pengalaman mahasiswa STAIN yang belum menerapkan kebijakan Kampus Merdeka. Biaya hidup mereka cenderung stabil dan uang kuliah mereka sangat terjangkau, bahkan ada yang hanya Rp.400.000 per semester. Menurut hasil penelitian, program Kampus Merdeka sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mahasiswa diikuti berbagai kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi melalui Kampus Merdeka mahasiswa punya kebebasan yang menguntungkan, tapi disisi lain mahasiswa harus memiliki kemampuan adaptasi tinggi, dan menyesuaikan pengeluaran dengan peningkatan biaya hidup. Hal tersebut tentu berbeda dengan yang di rasakan mahasiswa STAIN dimana biaya pengeluaran mereka masih stabil, tetapi tidak bisa merasakan kemudahan yang disediakan program Kampus Merdeka.

Kesesuaian Program dengan Organisasi Pelaksana

Kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dapat dimaknai sebagai kesesuaian tugas yang di isyaratkan program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Dalam penelitian ini, ketercapaian indikator dinilai dari ketersediaan unit pelaksana teknis dan pihak penanggungjawab pelaksana program untuk mencerminkan bentuk koordinasi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan jika di Universitas Teuku Umar telah ada unit pelaksana teknis yang menaungi magang dan membangun desa. Kepengurusan berkas dan persyaratan pendaftaran telah memiliki wadah yang disebut korpus magang dan KKN dibawah naungan LPPM diikuti kerjasama dengan melibatkan pihak fakultas dan prodi.

Unit pelaksana bagi program peserta pertukaran mahasiswa nyatanya belum dapat disediakan, sehingga dalam pengurusan berbagai aktivitas mahasiswa hanya melibatkan pihak dari program studi sebagai unit pelaksana dan penanggungjawab. Padahal prodi belum dibekali dengan pembagian tugas dan struktural jelas untuk melaksanakan pertukaran mahasiswa. Melalui uraian sebelumnya, pihak PTN yang menerapkan Kampus Merdeka telah berusaha menyediakan unit pelaksana program Kampus Merdeka serta penanggungjawab program. Tetapi untuk saat ini, unit pelaksana teknis belum dapat disediakan secara menyeluruh bagi semua kegiatan pembelajaran di luar studi akibat kebijakan yang masih bersifat baru, sehingga semua masih dalam tahap proses pengerjaan diikuti evaluasi dan perbaikan.

Kesesuaian Kelompok Sasaran (Mahasiswa) dengan Organisasi Pelaksana

Kesesuaian kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana merupakan kesesuaian syarat dari organisasi agar kelompok sasaran menerima output program diikuti apa yang harus dipenuhi oleh kelompok sasaran untuk mendapatkannya. Peneliti melihat dari sudut pandang tersedianya aturan jelas, SOP, sistem penilaian, serta syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan program pembelajaran di luar prodi tersebut. Berbicara tentang aturan dan SOP, mahasiswa pelaksana magang menyatakan jika telah ada pedoman pelaksanaan, namun masih membingungkan mahasiswa akibat kurang spesifik panduan dan merupakan penyamaan panduan antara program magang dan membangun desa atau KKN. Padahal kedua program tersebut berbeda. Oleh sebab itu, mahasiswa mengharapkan adanya SOP atau pedoman khusus sesuai kegiatan yang dipilih supaya dapat benar-benar menjadi pedoman yang mampu memandu mahasiswa untuk melaksanakan program.

Mengenai sistem penilaian, mahasiswa yang melaksanakan magang juga menguraikan keluhan yang dirasakan, dimana telah ada indikator penilaian yang di tetapkan oleh pihak Korpus, bahkan pemantauan kegiatan mahasiswa juga di cover dalam bentuk website bernama sikamago. Sayangnya keputusan dari

organisasi pelaksana terkadang seringkali berubah-ubah yang membuat mahasiswa harus selalu beradaptasi dengan perubahan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Hal ini kemudian mencerminkan jika kebijakan yang ditetapkan dan kebijaksanaan yang diambil oleh pihak organisasi pelaksana (Korpus Magang/KKN) tidak konsisten atau inkonsisten. Belum lagi dengan banyaknya pengunduran jadwal kegiatan, dan perubahan sistem penilaian. Bahkan, pelaksana pertukaran mahasiswa menyebutkan belum mempunyai pedoman kegiatan, meski sistem penilaian pelaksanaan sudah dapat dipahami yaitu melalui sistem konversi dari pihak universitas penerima ke universitas asal.

Pelaksanaan pertukaran mahasiswa telah dilaksanakan secara terbuka di Universitas Teuku Umar, akan tetapi keterlibatan dari prodi maupun mahasiswa sebagai pelaksana Kampus Merdeka masih sangat minim. Di tahun 2021, kegiatan pertukaran bersifat regional hanya dilaksanakan oleh Prodi Ilmu Administrasi Negara melibatkan dua mahasiswa dari belasan prodi yang ada dan di taraf internasional melibatkan 10 mahasiswa dari belasan prodi. Mengenai pertukaran pelajar baik regional yaitu antara UTU (Universitas Teuku Umar) dengan Unimal (Universitas Malikussaleh) maupun internasional yaitu antara Universitas Teuku Umar (Indonesia) dengan Universitas Malaysia. Minimnya keterlibatan dialasankan pada program yang masih baru dan belum punya wadah jelas bertugas dan menaungi pelaksanaan kegiatan-kegiatan program tersebut. Oleh sebab itu, diharapkan kedepannya program pertukaran mahasiswa dapat lebih disosialisasikan, diikuti penyediaan unit pelaksana, serta pedoman khusus sehingga akan lebih banyak mahasiswa yang terlibat, dan manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh mahasiswa serta Perguruan Tinggi.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Implementasi Kampus Merdeka di Aceh Barat nyatanya belum diterapkan secara menyeluruh di semua PTN karena terdapat PTN yang belum menerapkannya yaitu STAIN Teungku Dirundeng karena kebijakan yang masih sangat baru. Namun, Universitas Teuku Umar telah merealisasikan Kampus merdeka sejak 2020 silam. Kampus merdeka setidaknya telah menjawab permasalahan yang dihadapi perguruan Tinggi Negeri di Aceh Barat seperti mendukung upaya pengurangan pengangguran bergelar sarjana, tetapi tidak mengatasi secara mutlak, sebab terdapat faktor lain selain kurikulum yang menjadi tolak ukur yaitu ketekunan dan kedalaman intelektual yang dimiliki mahasiswa. Masalah utama yang dihadapi mahasiswa sebagai kelompok sasaran dalam kebijakan Kampus Merdeka adalah adaptasi lingkungan, bahasa dan budaya bagi pertukaran pelajar yang tidak mudah, serta masalah atau kendala terkait peningkatan biaya hidup selama mengikuti program, masih kurangnya bantuan dana dari pihak universitas, panduan program belum spesifik, sikap inkonsisten penanggungjawab kegiatan dalam mengeluarkan kebijakan dan memberikan kebijaksanaan, serta unit pelaksana kegiatan yang masih minim.

Saran

Diharapkan kedepannya program kampus merdeka seperti magang, membangun desa dan pertukaran mahasiswa maupun program lainnya bisa lebih dipersiapkan pelaksanaannya. serta bisa pula memfasilitasi asuransi bagi mahasiswa sebagai jaminan keselamatan saat melaksanakan magang. Kemudian diperlukan berbagai evaluasi dari kegiatan sebelumnya sehingga terdapat hal-hal yang dapat perbaikan agar berbagai kendala dan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran Kampus Merdeka teratasi. Supaya Kampus Merdeka benar-benar menjadi jawaban dan solusi dari permasalahan yang dihadapi mahasiswa maupun PTN yang ada di Aceh Barat, Aceh, maupun Indonesia nantinya.

Daftar Pustaka

- BBC.com. (2019). Peringkat pendidikan Indonesia di bawah Malaysia dan Brunei, China yang terbaik di dunia. BBC NEWS INDONESIA.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Ditjen Pendidikan Tinggi. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.
- Hadi, L. (2020). Pro dan Kontra Kebijakan Merdeka Belajar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 6(4), 812-818. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4302861>

- Hasim, E. (2020). Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Perguruan Tinggi Di Masa Pandemi Covid-19. Prosiding Webinar Magister Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo "Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Penulisan Karya Ilmiah Menuju Anak Merdeka Belajar," 68-74.
- Iskandar. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Gaung Persada Press.
- Kemendikbud RI. (2020). Permendikbud No 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. [Jdih.Kemdikbud.Go.Id](http://jdih.kemdikbud.go.id).
- Korten, D. C. (1984). Pembangunan yang Memihak Rakyat: Kupasan tentang Teori dan Pembangunan. Yayasan Studi Pembangunan.
- Marjan, Tuti, F., & Aswita, D. (2021). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Bagaimana Penerapan Dan Kedala Yang Dihadapi Oleh Perguruan Tinggi Swasta Di Aceh. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 8848(2), 603-614.
- Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja.
- Mulyadi, D. (2015). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Alfabeta.
- Mustaghfiroh, S. (2020). Konsep " Merdeka Belajar " Perspektif Aliran Progresivisme. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 3(1), 141-147.
- Prabowo, H. (2020). Pro dan Kontra atas Kebijakan "Kampus Merdeka" Nadiem. [Tirto.Id](http://tirto.id).
- Rodiyah. (2021). Impelementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Era Digital Dalam Menciptakan Karakter Nahasiswa Hukum Yang Berkarakter dan Profesional. Prosiding Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. (2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar Di Era Revolusi Industri 4.0. *Journal of Islamic Education*, 1(1), 141-157.
- Sopiansyah, D., & Masruroh, S. (2021). Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 34-41.
- Suryaman, M. (2020). Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar. 13-28.
- Wilestari, M. (2021). Divergent Thingking Untuk Kampus Merdeka. *Kocenin Serial Koferensi*, 1(1).